

BAB V

KESIMPULAN

Sejak mendapatkan kemerdekaan secara penuh dari pemerintah Inggris tanggal 18 Juni 1953 Mesir telah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Di pelopori oleh Gamal Abdul Nasser Mesir mengubah sistem pemerintahan yang telah bertahun-tahun di amputnya yaitu model monarki kerajaan menjadi negara demokratis presidensial. Gamal Abdul Nasser adalah pemimpin bangsa Mesir yang membebaskan bangsa Mesir dari belenggu penjajahan bangsa asing, sebagai presiden pertama Mesir yang menanamkan pilat demokrasi bagi rakyat Mesir.

Kemudian Nasser karena serangan jantung meninggal dunia bangsa Mesir menanggung nasib kematiannya Mesir kemudian di amput oleh Anwar Sadat yang sebetulnya merupakan sebagai wakil presiden. Sadat membawa Mesir menjadi negara yang lebih demokratis Jikalau saja in banyak partai yang lahir pada periode pemerintahan ini. Banyaknya partai yang lahir menjadikan Mesir menjadi negara multi partai sehingga menjadi punya warna politik yang beraneka warna. Banyaknya partai di Mesir pada akhirnya memunculkan gerakan oposisi dari partai atau kelompok yang tidak sepuas dengan pemerintahan.

Gerakan oposisi ini akhirnya menjadi lumrah bagi bangsa Mesir. Gerakan ini dia memunculkan akibat ditusuk oleh orang yang beridentifikasi berasal dari gerakan oposisi. Anwar Sadat kemudian digantikan oleh Hosni Mubarak seorang perwira muda yang merupakan angkatan udara Mesir yang pada akhirnya menjabat sebagai

wakil presiden. Husni Mubarak telah berkuasa selama 24 tahun sebuah rentang waktu yang cukup panjang. Melihat lamanya dia memegang kekuasaan di Mesir bukan berarti dalam pemerintahannya tidak ada gesekan politik dengan para kelompok oposisi, kepemimpinan Husni Mubarak diuntungkan dengan adanya Undang – undang darurat yang memungkinkannya melakukan penangkapan terhadap para oposan dengan alasan mengganggu keamanan dan stabilitas negara.

Tekanan dari kelompok opsisi diakhir tahun 2004 hingga awal tahun 2005 yang begitu kencang dan juga adanya tekanan dari Amerika Serikat untuk lebih mendemokratisasikan Mesir membuat Husni Mubarak mengambil inisiatif untuk mengamandemen UUD Mesir. Pasal yang paling penting adalah terkait dengan sistem pemilihan presiden pasal 76. Dalam pasal 76 sebelum diamandemen berisi bahwa presiden dipilih melalui referendum dimana calon tunggal yang disetujui oleh parlemen kemudian dilakukan referendum nasional dimana rakyat Mesir hanya memiliki hak jawab “ya” atau “tidak” terhadap calon yang diajukan oleh parlemen.

Setelah adanya amandemen terhadap pasal 76 yang disetujui rakyat Mesir pada tanggal 25 Mei 2005 maka isi dari pasal tersebut berubah menjadi pemilu presiden multi kandidat. Lengkapnya bahwa sistem pemilu presiden di Mesir sistem multikandidat yang dipilih oleh rakyat Mesir secara langsung. Calon yang akan maju dalam pemilu presiden harus mendapatkan persetujuan dari 2/3 anggota parlemen dan dewan kota. Selain itu juga hanya para pemimin partai yang

pertama ini disetujui bahwa peraturan yang ada dikecualikan sehingga semua pimpinan partai bisa mencalonkan diri menjadi presiden Mesir.

Pemilu presiden multi kandidat pertama telah selesai dilaksanakan pada tanggal 7 September 2005, hasilnya pun telah diketahui Husni Mubarak kembali memperoleh dukungan untuk memimpin Mesir periode 6 tahun ke depan. Perolehan suara menunjukkan Husni Mubarak kandidat dari Partai Nasional Demokratik menang mutlak dengan memperoleh suara sebanyak 88,6 % suara, Disusul oleh Ayman Nour dengan 7,6 % suara yang merupakan kandidat dari Partai Al Ghad, dan kemudian Noaman Goma dengan 2,9 % suara kandidat dari Partai Al Wafd di peringkat ketiga.

Pada pemilu presiden tahun 2005 ini diikuti oleh sepuluh kandidat calon presiden dari 21 partai yang terdaftar di Mesir hal ini menunjukkan banyaknya partai yang tidak mengikuti pemilu presiden multikandidat pertama ini. Ketidaksiertaan beberapa partai politik di Mesir merupakan aksi boikot terhadap pemilu yang dianggap hanya sandiwara Husni Mubarak untuk mendapatkan jabatan presiden dengan cara yang lebih demokratis.

Kemenangan Husni Mubarak dalam pemilu presiden multikandidat ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, matangnya strategi kampanye Husni Mubarak, popularitas Husni Mubarak sebagai *incumbent* sehingga dapat memanfaatkan fasilitas negara dalam kampanyenya, adanya UU Darurat yang memungkinkan Husni Mubarak melakukan tekanan terhadap warga negara Mesir sehingga memilih dirinya kembali., penguasaan media massa yang begitu dominan. Berikut adalah faktor-faktor penentu kemenangan Husni Mubarak :

Faktor yang pertama adalah matangnya strategi kampanye Husni Mubarak. Sebagai Incumbent Husni Mubarak dapat memanfaatkan popularitasnya di mata rakyat Mesir, sebagai presiden yang sedang berkuasa tentunya Husni Mubarak lebih dikenal oleh masyarakat Mesir dari pada kandidat yang lain. Karena sedang menjabat pula Husni Mubarak dapat menyusun strategi kampanye dengan cara menyisipkan program kampanyenya disaat kunjungan kenegaraan di daerah, juga dapat memaparkan program – program pembangunan baik politik maupun ekonomi yang telah dilaksanakan selama kepemimpinannya.

Faktor kedua adalah sebagai Incumbent tentunya Husni Mubarak dapat memanfaatkan alat – alat hukum yang mendukung untuk terpilihnya kembali Husni Mubarak dalam pemilu presiden multi kandidat 2005 ini. Husni Mubarak memanfaatkan UU Darurat sebagai sarana untuk menguasai rakyat Mesir. Hal ini dapat dilakukan karena dalam UU Darurat tersebut pemerintah berwenang untuk menangkap setiap warga negara yang berseberangan sikap dengan pemerintah. Husni Mubarak memanfaatkan UU ini untuk menangkap setiap oposan yang berpotensi melawan kekuasaannya. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi warga negara jika ingin mendapatkan keamanan kecuali bersikap sejalan dengan pemerintah.

Faktor ketiga adalah terkait dengan kemampuan Husni Mubarak dalam menguasai media massa, hal ini sangat penting karena media massa baik cetak seperti koran maupun elektronik seperti televisi mempunyai pengaruh yang cukup efektif dalam membentuk opini publik sehingga hal ini benar – benar

berkuasa tentunya Husni Mubarak selalu mendapat porsi lebih dalam setiap liputan kampanyenya.

Meskipun reformasi telah digulirkan oleh Husni Mubarak namun tidak ada jaminan bahwa masa jabatan Husni Mubarak untuk enam tahun ke depan akan lancar tanpa ada hambatan dari dalam negeri. Banyaknya angka yang tidak memilih pada pemilu presiden 2005 ini menunjukkan legitimasi Husni Mubarak di mata rakyat Mesir tergolong rendah. Sementara kelompok oposisi berpandangan bahwa perjuangan mendapatkan perubahan baru saja di mulai dengan amandemen terhadap pasal 76 terkait dengan sistem pemilihan presiden jadi untuk periode enam tahun ke depan ini Husni Mubarak tentunya akan mendapatkan tekanan yang lebih kencang lagi dari kelompok oposisi menuntut